1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi negative menunjukkan penurunan kegiatan ekonomi.

Pembangunan merupakan salah satu tugas pokok yang diemban pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Berdasarkan konsep pembangunan, mencakup pentingnya alokasi sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sebagai metode alokasi sumber-sumber daya (*resources*) yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana, dan sumber daya manusia. Dari perspektif ini, pembangunan memperluas akses publik untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kepentingan umum, dan berbagai fasilitas layanan dasar infrastruktur (Pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, keamanan, dll.) sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat yang dapat mendorong akses publik terhadap ketersediaan dan keberlanjutannya.

Pembangunan juga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan, yang akan meningkat dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) prasarana ekonomi, yaitu prasarana fisik yang digunakan baik oleh proses produksi maupun masyarakat, termasuk semua prasarana umum seperti listrik, telekomunikasi, transportasi, irigasi, air bersih dan sanitasi, serta persampahan. (2) Prasarana masyarakat, yaitu prasarana social seperti kesehatan dan pendidikan (Maqin, A., 2014).

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketidacukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Rusmusi 2018). Suswita (2020) membuktikan bahwa infrastruktur panjang jalan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini mendukung apa yang ditemukan oleh Maqin (2014) bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Maqin 2014).

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perkembangan ekonomi suatu daerah adalah rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, yang membuat daerah dan sumber dayanya kurang menarik karena terbatasnya sarana dan prasarana. Daerah-daerah yang kekurangan sumber daya manusia dan alam, dan daerah-daerah yang kekurangan insentif yang diberikan (infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak, serta keamanan), dapat meninggalkan daerah-daerah yang ada. Ada beberapa pilihan untuk mengembangkan suatu daerah agar dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Alternatif dapat berupa investasi langsung dibidang manufaktur atau investasi dalam biaya social seperti pembangunan jalan, perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya. Infrastruktur merupakan fondasi pembangunan, sehingga pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur harus diperhatikan.

Secara umum kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat khususnya Infrastruktur Panjang Jalan mengalami perkembangan yang bisa dilihat dari penambahan panjang dan ruas jalan serta pembangunan jalan-jalan baru yang digunakan untuk mempermudah akses transportasi, namun berdasarkan latar belakang keadaan demografis, geografis, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, maka salah satu

konsekuensi logis adalah terjadinya perbedaan kinerja pembangunan antar daerah yang selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan dalam kemajuan dan tingkat kesejahteraan antar daerah. Ada beberapa daerah di Kalimantan Barat dengan akses jalan tidak begitu Panjang salah satunya Kabupaten Kayong Utara, hal ini dikarenakan daerah tersebut mempunyai letak geografis yang lebih mudah dilewat dengan akses sungai. Ada juga beberapa daerah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Sanggau yang sebagian masih menggunakan akses Sungai dikarenakan belum ada akses Jalan darat. Sedangkan Daerah yang dekat dengan perkotaan cenderung mempunyai akses jalan yang Panjang. Penduduk Kalimantan Barat terus bertambah setiap tahunnya, dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan infrastruktur juga semakin bertambah tak terkecuali infrastruktur panjang jalan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan transportasi dan aktifitas lainnya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan kemajuan daerah terkait.

Selain infrastruktur panjang jalan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan artikel yang terbit di Kalbar Online (2021). IPM Kalimantan Barat masih jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional, sehingga Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menegaskan pembangunan Kalbar ke depannya akan lebih berfokus pada peningkatan IPM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Kalimantan Barat memiliki IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari tahun 2016 hingga 2020 telah terjadi peningkatan sebesar 2,02%.

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2016-2020

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2016	65,88
2	2017	66,26
3	2018	67,65
4	2019	67,66
5	2020	67,90

Sumber: BPS, diolah

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting agar IPM meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel 1.1, IPM Kalimantan Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini berarti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Utami (2020), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi & Sutrisna, 2014). Secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Rimawan, 2019). Dengan kata lain, semakin tinggi IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal, yang ditunjukkan dengan aset daerah. Aset Daerah merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan

ekonomi. Adanya aset daerah membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik, didorong oleh kemajuan teknologi untuk menghasilkan efisiensi produksi di masa depan.

Tabel 1.2

Aset Daerah Kalimantan Barat

Tahun	Total Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2016	Rp 7.593.574.406.129,42
2017	Rp 8.896.627.606.816,85
2018	Rp 11.394.528.632.394,92
2019	Rp 12.135.138.022.266,50
2020	Rp 12.527.094.214.802,44

Sumber: Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan aset daerah masih sangat rendah karena kurangnya pendapatan daerah untuk menyediakan modal yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan suntikan dana dari negara yang dapat digunakan untuk membangun ekonomi daerah. Suatu investasi untuk membeli produk-produk yang menunjang produksi agar produksi dapat ditingkatkan. Tingkat investasi mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB), karena peningkatan produksi dapat meningkatkan perekonomian negara. Pada tabel 1.2, total aset daerah dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa pendapatan daerah juga berkembang sehingga dapat meningkatkan nilai aset dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pemaparan dan permasalahan yang terjadi maka peneliti mengambil topik penelitian berdasarkan variabel infrastruktur Panjang jalan, indeks pembangunan manusia, dan aset daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena aset daerah merupakan komponen yang menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sehingga dengan aset daerah yang meningkat maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan didukung dengan peningkatan akses di daerah tersebut yang dapat dilihat dari pertumbuhan Panjang jalan sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan tersebut maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut serta dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang mendasari penggunaan variabel infrastruktur Panjang jalan, indeks pembangunan manusia, dan aset daerah karena dari beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda serta berdasarkan teori variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian “Pengaruh Panjang Jalan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Aset Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat”.